

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENGELUARAN PEMERINTAH
BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI KOTA PADANG

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Penulisan Skripsi
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



TIKA DESIANA PUTRI
165110977

PROGRAM STUDI EKONOMI BISNIS PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KOTA PADANG

OLEH:

TIKA DESIANA PUTRI

NPM: 165110977

(Dosen Pembimbing: Drs. M. Nur, MM)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Padang. Metode analisa data pada penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, pengaruh pengeluaran di bidang kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X_1) dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (X_2) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (Y) di Kota Padang.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECT OF GOVERNMENT EXPENDITURE LEVEL IN EDUCATION AND HEALTH ON HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN PADANG CITY

BY:

TIKA DESIANA PUTRI

NPM: 165110977

(Consultant: Drs. M. Nur, MM)

This study aims to determine the influence of government spending levels in education and health on the index of human development in Padang City. The data analysis method in this study was conducted with multiple regression analysis used to determine the influence of government spending in education, the influence of spending in the health sector on the human development index. The results showed that the variables of government spending in education (X_1) and government spending in the field of health (X_2) had a positive and significant influence on the human development index (Y) in Padang City.

Keywords: *Human Development Index, Government Expenditure on Education, Government Spending on Health.*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'la karena dengan rahmat, dan karunia-Nya yang menciptakan manusia dengan kelebihan akal untuk berfikir terhadap alam dan lingkungan serta dengan peranan kalam, berkat hidayah dan petunjuk serta kerja dan kesungguhan akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KOTA PADANG” guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. Dengan demikian, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak lepas dari keterbatasan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan pengetahuan penulis dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan limpahan kepada Nabi Muhammad Shallahu Alaihi Wassalam, dan keluarga serta para sahabatnya mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita semua. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan pengarahan serta motivasi yang telah diberikan, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini disamping bantuan lain dari berbagai pihak yang juga bermakna.

Oleh karena itu pada kesempatan ini tidak ada kata lain yang lebih indah dan lebih layak dan penghargaan yang mendalam dari penulis kepada:

1. Bapak Dr. Firdaus A. Rahman, SE., M.Si., AK CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
2. Bapak Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Bapak Drs. M. Nur., MM selaku ketua jurusan dan sebagai pembimbing, yang telah meluangkan waktu, memberikan banyak saran, perbaikan dan motivasi untuk keempurnaan penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Sinta Yulyanti, SE., M.Ec.Dev selaku sekretaris jurusan dan penguji II, yang telah memberikan arahan dan saran yang sangat membangun dalam perbaikan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Nawarti Bustamam, SE., M.Si sebagai penguji I, yang telah banyak memberkan arahan dan saran yang sangat membangun dalam perbaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan Staf yang berada di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan pelayanannya sangat membantu terealisasikan skripsi ini.

7. Terimakasih kepada Instansi Pemerintah Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota Padang yang sangat membantu dalam memberikan data yang dibutuhkan oleh penulis.
8. Terimakasih tiada tara kepada Orang Tua saya tercinta yang selalu memberikan do'a, semangat, motivasi, dukungan, serta nasihat yang tiada henti dan kasih sayang yang tulus kepada saya selaku penulis
9. Terimakasih kepada Abang saya Arie Rizky S.pd dan kakak saya Febriza Wulanda S.kep serta Keluarga Besar saya yang telah memberikan do'a dan semngat kepada penulis.
10. Terimakasih kepada sepupu-sepupu saya Yolla Dwita Sari S.si, Indah Dwiana, Denada Mehartika, Leony Monica Adella, Indah Puspita Sari, dan kakak sepupu saya Retha Supriastuty Amd.keb yang telah memberikan dukungan dan semangatnya.
11. Terimakasih kepada teman seperjuangan saya di grup Mahasiswa Akhir Indri Maharani SE, Rani Novitasari SE, Gustina Sri Rahayu SE, Gia Rahayu SE dan Riska Yulia yang telah memberikan waktu dan dukungan semasa proses penelitian ini.
12. Dan terimakasih kepada teman-teman Ekonomi Pembangunan kelas B angkatan 2016 yang memberikan dukungan selama masa perkuliahan hingga proses penelitian ini, semoga kita semua bisa meraih kesuksesan dan impian kita dapat terwujud.

Atas semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga Allh Subhanahu wa Ta'ala, memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada mereka semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat.

Pekanbaru, Juni 2021

TIKA DESIANA PUTRI

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS.....	14
2.1 Tinjauan Pustaka.....	14
2.1.1 Teori Indeks Pembangunan Manusia.....	14
2.1.2 Dimensi Indeks Pembangunan Manusia.....	18
2.1.3 Pengeluaran Pemerintah	22
2.1.4 Teori-Teori Pengeluaran	24
2.1.5 Belanja Daerah Bidang Pendidikan	26
2.1.6 Belanja Daerah Bidang Kesehatan	27
2.1.7 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap IPM.....	28
2.2 Penelitian Terdahulu	29
2.3 Hipotesis	30
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	31
3.1 Lokasi Penelitian.....	31
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	31

3.3 Populasi dan Sampel	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data	31
3.5 Metode Analisis Data	32
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Padang	39
4.3 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan di Kota Padang	40
4.4 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan di Kota Padang	41
4.5 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	43
4.5.1 Koefisien Regresi	44
4.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	45
4.5.3 Uji T (Uji Parsial)	45
4.5.4 Uji F	46
4.5.5 Uji Asumsi Klasik	46
4.6 Pembahasan	50
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	52
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Padang Tahun 2010-2019.....	2
Tabel 1.2 Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Kota Padang Tahun 2010-2019	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4.1: Luas Wilayah Kota Padang Menurut Kecamatan dan Banyak Kelurahan di Kota Padang Tahun 2020.....	42
Tabel 4.2: Pulau Kecil di Kota Padang Berdasarkan Lokasi Tahun 2020	43
Tabel 4.3: Realisasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan di Kota Padang Tahun 2010 – 2019	46
Tabel 4.4: Realisasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan di Kota Padang Tahun 2010 – 2019	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1: Statistik Durbin-Watson d	34
Gambar 4.1: Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Padang	44



Dokumen ini adalah Arsip Mlik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara dimana pembangunan suatu negara belum bisa di katakan berhasil apabila dilihat hanya dari besarnya pendapatan domestik bruto tanpa adanya upaya peningkatan pembangunan manusia sendiri, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakatnya. Indeks pembangunan manusia menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai indikator utama disamping indikator ekonomi. Tinggi dan rendahnya kualitas sumber daya manusia akan ditentukan oleh tingkat kesehatan, pendidikan dan tingkat pendapatan perkapitanya. Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan saat ini.

Menurut Badan Pusat Statistik Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar dimasyarakat tersebut dapat teratasi.

Dari tahun ke tahun perhatian pemerintah khususnya para elit kekuasaan politisi termasuk para pengamat, akademis dan peneliti tertuju pada laporan *Human Development Index* (HDI) yang dipublikasikan setiap tahun oleh *United*

Nation Development Programme (UNDP) ialah lembaga dunia yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia ialah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. (Mirza. 2012).

Kota Padang merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Angka indeks pembangunan manusia di Kota Padang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1 : Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Padang Tahun 2010-2019

No	Tahun	Indek Pembangunan Manusia (%)
1	2010	77,81
2	2011	78,15
3	2012	78,55
4	2013	78,82
5	2014	79,83
6	2015	80,36
7	2016	81,06
8	2017	81,58
9	2018	82,25
10	2019	82,68

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2020

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa angka indeks pembangunan manusia di Kota Padang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2010 IPM Kota Padang sebesar 77,81% hingga pada tahun 2019 angka IPM di Kota Padang mencapai 82,68%. Hal tersebut berarti upaya pemerintah Kota Padang dalam peningkatan pembangunan manusia di Kota Padang cukup tinggi.

Menurut Dale Jorgenson dkk (1987) dalam Jurnal Ilmu Ekonomi Andalas, menghubungkan bahwa hubungan investasi sumber daya manusia dalam Pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi merupakan dua mata rantai yang tidak terpisahkan. Namun demikian, pertumbuhan tidak akan tumbuh dengan baik walaupun peningkatan atau mutu sumber daya manusia dilakukan. Jika tidak ada program yang jelas tentang peningkatan mutu pendidikan dan program ekonomi (Anggaran Pendidikan) yang jelas.

Ada dua sektor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sehubungan dengan upaya memperbaiki kualitas penduduknya dalam mencapai kesejahteraan penduduknya ialah sektor Pendidikan dan sektor Kesehatan. Melalui pendidikan akan terbentuk sosok-sosok individu sebagai sumber daya manusia yang berperan besar dalam membangun bangsa dan negara. Pendidikan terlihat sebagai investasi sumber daya saat ini untuk mendapatkan return di masa yang akan datang atau dapat dikatakan sebagai bentuk investasi jangka panjang.

Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai masalah krusial seperti pengangguran, kriminalitas yang

akan menjadi beban sosial politik bagi pemerintah. Sedangkan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara.

Oleh karena itu peran pendidikan dan kesehatan sangat penting sebab pendidikan dan kesehatan merupakan kunci utama dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia yang secara otomatis akan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Ada beberapa faktor penentu pertumbuhan ekonomi suatu daerah antara lain: Barang modal, Tenaga kerja, Teknologi, Manajemen, Kewirausahaan dan informasi. Selain faktor yang sudah tertera di atas pengeluaran pemerintah juga tidak kalah pentingnya berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Untuk menghasilkan ketersediaan modal yang berkualitas pemerintah sangat penting dalam mengalokasikan anggaran dibidang pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran sektor pendidikan dan kesehatan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu faktor dari pertumbuhan ekonomi, juga tidak kalah pentingnya berperan dalam meningkatkan pembangunan manusia.

. pengeluaran pemerintah disektor pendidikan dan kesehatan juga diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Paradigma pembangunan menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari pembangunan, yaitu

tercapainya penguasaan atas sumber daya, peningkatan pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan.

Indeks pembangunan manusia merupakan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan.

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan (Wahid, 2012).

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan ialah dengan meningkatnya jumlah pelajar yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ketingkat yang lebih tinggi. Karna semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu untuk mengerti dan dapat menerapkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi.

Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. (Kuncoro, 2013).

Menurut Tjiptoherijanto, dalam Astri (2013) melihat mutu manusia dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Salah satu instrument kebijakan yang penting ialah APBD dengan pengaturan distribusi anggarannya. Dengan adanya anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD) suatu daerah dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah lalu membelajarkan dana tersebut sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam peraturan daerah. Sesuai dengan teori IPM yang menekankan pentingnya peran pemerintah didalam kedua sektor tersebut. Pemerintah harus mengalokasikan 20% untuk sektor pendidikan dan 10% untuk kesehatan dari total APBD sesuai dengan UU NO. 20 Tahun 2003 pasal 49 tentang pendidikan dan UU No. 36 Tahun 2009 pasal 171 tentang kesehatan.

Anggaran yang telah ditetapkan tersebut diharapkan mampu untuk memenuhi segala kebutuhan di bidang pendidikan dan bidang kesehatan setiap daerah di Indonesia khususnya di Kota Padang. Hal tersebut diharapkan mampu untuk meningkatkan angka IPM di Kota Padang. Jumlah pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan di Kota Padang bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2: Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Kota Padang Tahun 2010-2019

No	Tahun	Bidang Pendidikan (Rp)	Bidang Kesehatan (Rp)
1	2010	51.241.784.000,00	6.601.247.000,00
2	2011	68.168.030.000,00	31.270.090.000,00
3	2012	60.710.480.000,00	29.359.190.000,00

4	2013	51.898.760.000,00	22.466.460.000,00
5	2014	88.578.890.000,00	84.574.580.000,00
6	2015	89.857.356.500,00	83.185.985.580,00
7	2016	86.073.007.396,00	121.694.935.281,00
8	2017	185.521.711.330,00	100.141.285.358,00
9	2018	722.956.168.538,00	173.614.121.823,00
10	2019	746.715.380.610,00	192.774.334.360,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2020

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pengeluaran pemerintah terendah dibidang pendidikan pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 51.241.784.000,00 dan jumlah pengeluaran tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 746.715.380.610,00. Sedangkan pengeluaran pemerintah terendah dibidang kesehatan pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 6.601.247.000,00 dan jumlah pengeluaran tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 192.774.334.360,00.

Tingginya jumlah yang dikeluarkan Pemerintah Kota Padang pada bidang pendidikan dan kesehatan diharapkan mampu untuk menjunjang masyarakat di Kota Padang sehingga indeks pembangunan manusia di Kota Padang bisa meningkat. Pemerintah Kota Padang harus konsisten dan transparan dalam perencanaan anggaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan agar anggaran yang dikeluarkan tidak salah sasaran.

Pengeluaran pemerintah terhadap sektor pendidikan dan kesehatan merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah yang memacu keajahteraan

masyarakat dan pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan manusia. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas dan dengan asumsi teori-teori yang ada, maka penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul “ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KOTA PADANG”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Padang?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang saya buat, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Padang.
- 2 .Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Padang

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait antara lain:

1. Bagi Pemerintah

Memberikan bahan masukan dalam membuat kebijakan bagi pemerintah dan instansi sejenis mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah disektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Padang.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam aspek yang sama maupun bidang lain yang berhubungan.

3. Bagi Penulis

Sebagai sarana mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pemahaman, maka penelitian ini dibagi dalam V BAB, dimana tiap bab nya akan dibagi dalam sub-sub dengan kerangka sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika dalam penulisan penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Pada bab ini akan diuraikan tinjauan pustaka yang merupakan teori penunjang dalam penulisan proposal ini, penelitian terdahulu, dan

penyusunan hipotesis. Teori-teori tersebut di ambil dari berbagai sumber seperti buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data dan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan pembahasan untuk rumusan masalah yang telah diuraikan di atas.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan penelitian tersebut dan saran untuk perkembangan indeks pembangunan manusia yang ada di Kota Padang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Indeks Pembangunan Manusia

Dalam rangka pembangunan bangsa dibutuhkan modal manusia yang memenuhi kualifikasi keterampilan, pengetahuan dan kompetensi pada berbagai bidang keahlian. Maka diperlukan tolak ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, hal ini mendasari adanya ukuran yang ditetapkan oleh *United Nation Development Programme* dalam teori Indeks Pembangunan Manusia yaitu suatu pendekatan yang digunakan sebagai tolak ukur tinggi rendahnya pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yakni umur yang panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan layak. Indeks pembangunan manusia di rumuskan pada tahun 1990 oleh UNDP (*United Nations Development Programme*). Menurut UNDP, pembangunan manusia merupakan perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choices of people*), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah perluasan pilihan dan sekaligus sebagai taraf yang di capai dari upaya tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari upaya peningkatan kemampuan modal dasar manusia. Pembangunan Manusia merupakan komponen pembangunan melalui pembedayaan penduduk yang menitik beratkan pada peningkatan dasar manusia.

Pembangunan yang dihitung menggunakan ukuran besar kecilnya angka pendidikan dan kesehatan, semakin tinggi angka yang diperoleh maka semakin tercapai tujuan dari pembangunan.

Menurut Soleha (2016), Indeks Pembangunan Manusia memiliki manfaat di antaranya:

1. Menyadarkan para pengambil keputusan agar lebih terfokus pada pencapaian manusia, karena IPM diciptakan untuk menjadi hal utama dalam pembangunan sebuah Negara, bukan pertumbuhan ekonomi.
2. Mempertanyakan pilihan-pilihan kebijakan suatu Negara, bagaimana dua Negara yang tingkat pendapatan perkapitanya sama dapat memiliki IPM yang berbeda.
3. Memperlihatkan perbedaan diantara Negara-negara, diantara Provinsi (atau Negara bagian), diantara gender, kesukuan, dan kelompok social ekonomi lainnya. Dengan memperlihatkan disparitas atau kesenjangan diantara kelompok-kelompok tersebut, maka akan lahir berbagai debat dan diskusi di berbagai Negara untuk mencari sumber masalah dan solusinya.

Menurut Meier dan Rauch (dalam Aloysius Gunadi Brata, 2002) pendidikan atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat.

Pembangunan menjadi hal yang sangat penting terutama bagi Negara yang sedang berkembang. Perbandingan pendapatan dan pembangunan diberbagai Negara membuktikan adanya tingkat perbedaan yang rlatif besar mengukur taraf kemakmuran diantara Negara maju dan Negara berkembang. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sangat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan yang sedang berlangsung saat ini. Pengembangan sumber daya manusia saat ini diarahkan untuk merubah sumber daya manusia yang potensial menjadi tenaga kerja yang produktif (Elfindri dan Nasri, 2004)

Ukuran pembangunan yang digunakan selama ini yaitu PDRB dalam situasi nasional dan PDRB dalam situasi regional, hanya mampu menggambarkan pembangunan ekonomi saja. Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita suatu masyarakat dalam jangka panjang (suryana, 2000). Kemajuan bidang ekonomi adalah satu factor paling penting dalam sebuah proes pembangunan namun unsur tersebut bukanlah satu-satunya factor yang dapat mendorong kemajuan sebuah perekonomian, akan tetapi, pembangunan manusia juga harus menjadi bagian penting dari adanya pembangunan yang biasanya hanya dipandang sebagai suatu *proses multi-dimensi* yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi dari seluruh sistem sosial dan ekonomi yang ada (Todaro M. P., Ekonomi Negara Berkembang, 1994)

Menurut UNDP (*United Nation Development Programme*), untuk mengetahui tingkat indeks pembangunan suatu daerah dapat dideskripsikan melalui beberapa faktor , yaitu umur panjang dan sehat yang ditinjau dari segi

kesehatan; angka melek huruf, partisipasi sekolah, dan rata-rata lamanya bersekolah untuk mengukur kinerja pembangunan apabila dilihat dari segi pendidikan dan kemampuan masyarakat untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ditinjau dari segi rata-rata besarnya pengeluaran perkapita. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100. Pengertian IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang dirilis dari UNDP menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia. Sejak tahun 1990 UNDP mulai melakukan penelitian pada IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau HDI (*Human development index*) secara konsisten menerbitkan seri tahunan dalam publikasi yang berjudul *Human Development Report*, sebagai upaya untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia suatu Negara. Walaupun belum mampu mengukur semua aspek pokok dari pembangunan manusia

Pembangunan manusia merupakan komponen utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu UNDP (*united nations development programme*) membentuk indikator dasar untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (Badrudin,2012). Secara teknis, IPM memberikan suatu ukuran gabungan pada tiga dimensi, yaitu: (i) umur panjang dan hidup sehat (*life expectancy at birth*) (ii) pengetahuan (*adult literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah penduduk dewasa (*mean years schooling*); serta (iii) standar hidup layak (*purchasing power parity*).

Upaya meningkatkan IPM di Indonesia dilakukan melalui instrument kebijakan fiskal, dimana penyediaan pelayanan dasar dilaksanakan melalui

mekanisme anggaran. Alokasi anggaran bidang kesehatan dan pendidikan masuk kedalam kategori belanja social. Dalam praktiknya, pemerintah daerah mempunyai kebijakan yang berbeda dalam meningkatkan sumber daya manusianya. Hal ini dapat dilihat pada format penganggaran belanjanya pada bidang kesehatan bernama *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sejak pengukuran IPM diberlakukan, prioritas pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi lebih kepada manusia sebagai elemen dan pendidikan, sehingga hasil yang diperoleh tiap-tiap daerah berbeda-beda. Kondisi ini demikian menjadi polemic yang memunculkan perdebatan peran pemerintah yang belum maksimal dalam mensejahterakan masyarakat melalui penerapan kebijakan.

Indeks pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua Negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklarifikasikan apakah sebuah Negara adalah Negara maju, Negara berkembang atau Negara terbelakang pengaruh kebijaksanaan ekonomi terhadap dan juga untuk mengukur pengaruh kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang mantap dengan mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi.

2.1.2 Dimensi Indeks Pembangunan Manusia

1. Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur panjang dan hidup sehat merupakan indikator yang memiliki dimensi umur harapan hidup sehat saat lahir dalam menghitung IPM. Umur

panjang yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana maupun prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Dengan adanya kesehatan akan lebih berarti bagi masyarakat dengan adanya fasilitas yang murah dan terjangkau yang sangat membantu dalam meningkatkan produktivitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Kesehatan merupakan salah satu faktor utama bagi pengembangan juga pembinaan sumber daya manusia (SDM). Undang-undang Dasar 1945 mengamatkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia. Pasal 28 H ayat 1 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pada Pasal 3 Ayat 3 ditegaskan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak”.

2. Indeks Pengetahuan

Indeks pengetahuan mempunyai dimensi yang terdiri dari dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Cakupan dalam menghitung harapan lama sekolah adalah oleh anak pada umur 7 tahun. Sebagai lamanya sekolah yang diharapkan yang akan dirasakan, sementara cakupan penduduk untuk menghitung rata-rata lama sekolah yaitu dari usia 25 tahun ke atas. Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang selesai dalam pendidikan formal. Salah satu tujuan yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mendapatkan pengajaran,

pendidikan dan ilmu pengetahuan yang juga merupakan hak asasi manusia sesuai dengan Undang-undang 1945 pasal 28C, pasal 28E, dan pasal 31.

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan yang sesuai prosedur pendidikan itu sendiri. Menurut undang-undang No. 20 Tahun 2003 pengertian pendidikan adalah sebuah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, membangun kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Secara umum tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap tuhan yang maha esa dan berbudi pekerti luhur, yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani. Kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dari pengertian pendidikan tampak jelas adanya peran pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui proses pendidikan akan terbentuk sosok-sosok individu sebagai sumber daya manusia yang akan berperan besar dalam proses pembangunan bangsa dan Negara. Oleh karena itu peran pendidikan sangat penting, sebab pendidikan merupakan kunci utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih efektif.

Guna mencapai sumber daya manusia yang berkualitas, maka dibutuhkan beberapa upaya diantaranya adalah terdapatnya pendidikan yang diorganisasikan secara formal pada tingkat dasar, menengah, atas dan pendidikan pada tingkat tinggi. Manfaat dari adanya pendidikan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi suatu bangsa secara umum dapat dilihat dari pendapat Tadaro, yaitu:

- 1) Dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif karna adanya peningkatan pengetahuan dan keahlian.
 - 2) Tersedianya kesempatan yang lebih luas.
 - 3) Terciptanya suatu kelompok pemimpin yang terdidik guna mengisi jabatan-jabatan dalam dunia usaha maupun pemerintah.
 - 4) Tersedianya berbagai macam program pendidikan dan pelatihan yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan dalam keahlian dan mengurangi angka buta huruf.
3. Standar Hidup Layak

Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan yang diwakili oleh indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan, dari tahun ke tahun, pengeluaran perkapita yang disesuaikan di Indonesia terus mengalami peningkatan. Sedangkan BPS dalam menggunakan standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat, UNDP mengukur standar hidup layak yang menggunakan Produk Domestik Bruto riil yang sudah disesuaikan.

2.1.3 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Setiap tahunnya ke berbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui bermacam-macam program. Pengeluaran pemerintah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta. (Suparmoko,1998). Pengeluaran dikelompokkan dalam dua golongan yaitu:

1. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang secara rutin setiap tahunnya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan roda pemerintah yang terdiri dari: belanja pegawai, yakni untuk pembiayaan gaji pegawai termasuk gaji pokok dan tunjangan.

Pengeluaran rutin memegang peran penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintah serta upaya peningkatan efisiensi dan produktifitas yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan.

2. Pengeluaran pembangunan

Pengeluaran pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka menambah modal masyarakat. Contoh pembangunan fisik adalah pembangunan jalan, jembatan, sekolah dan rumah sakit. Sedangkan pembangunan nonfisik seperti pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung kepada banyak faktor, yang terpenting diantaranya yaitu:

1. Proyeksi jumlah pajak yang diterima

Salah satu faktor yang penting dalam menentukan besarnya pengeluaran adalah jumlah pajak yang diramalkan. Dalam menyusun anggaran belanjanya pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak uang sudah diterimanya. Makin banyak jumlah pajak yang telah dikumpulkan maka makin banyak pula perbelanjaan yang akan dilakukan.

2. Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai

Pemerintah sangat penting sekali peranannya dalam perekonomian. Beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi masalah pengangguran, terhindar dari inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka yang sangat panjang.

2.1.4 Teori-Teori Pengeluaran

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah, apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Adapun teori pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu teori mikro dan makro, sebagai berikut:

1. Pengeluaram pemerintah secara mikro

Teori Mikro mengenai pengeluaran pemerintah menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya permintaan akan barang-barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran barang publik menentukan jumlah barang publik yang disediakan. Selanjutnya akan menimbulkan permintaan terhadap barang lain. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah:

- a) Perubahan permintaan akan barang publik
- b) Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik
- c) Perubahan kualitas barang publik
- d) Perubahan harga faktor-faktor produksi

2. Pengeluaran Pemerintah secara Makro

Adapun beberapa teori-teori pengeluaran pemerintah secara makro, adalah sebagai berikut:

a) Teori Keynes

Persamaan keseimbangan pendapatan nasional menurut Keynes adalah $Y = C + G + (X - M)$. Dimana (Y) merupakan pendapatan nasional, (C) merupakan pengeluaran konsumsi, (G) merupakan pengeluaran pemerintah. Menurut Keynes dengan membandingkan nilai (G) terhadap (Y) serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah didalam pembentukan pendapatan nasional.

b) Teori Rostow dan Musgrave

Teori ini dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave yang didasarkan pandangan mereka mengenai pengamatan terhadap pembangunan ekonomi di beberapa Negara. Model ini menghubungkan tahap-tahap pembangunan ekonomi dan pengeluaran pemerintah. Yang terdiri dari tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal presentase pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal ini dikarenakan pada tahap awal pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya.

2.1.5 Belanja Daerah Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan satu investasi yang sangat berguna untuk pembangunan ekonomi. Dengan itu juga pendidikan dapat dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati oleh semua manusia dikemudian hari. Pendidikan mempunyai peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang dampaknya langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dengan melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas kerja.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2008 Pasal 1 ayat ke (3) Anggaran belanja fungsi pendidikan yang dianggarkan dalam APBD untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, anggaran pendidikan yang dikelola dan sudah dialokasi secara

tepat yang mampu untuk meningkatkan tingkat melek huruf dan tingkat lama sekolah.

Belanja pendidikan merupakan jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam bidang pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pengalokasian dana pendidikan disebut bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada bidang pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besarnya pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan menunjukkan bahwa perhatian pada usaha komponen utama yang terdapat didalamnya adalah kemiskinan. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah melalui perbaikan kualitas pendidikan. Pendidikan dapat dilihat sebagai komponen vital dalam pertumbuhan dan pembangunan, sehingga pemerintah berperan sebagai untuk mengalokasikan belanja untuk peningkatan pembangunan melalui peningkatan-peningkatan.

2.1.6 Belanja Daerah Bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap manusia, tanpa adanya kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas untuk Negara. Kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, kesehatan juga dapat dilihat dari sebagai komponen pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi yang sebagai input produksi

agregat, input maupun output sebagai peran yang menyebabkan kesehatan sangat penting dalam pembangunan manusia (Todaro, 2011:85).

Belanja kesehatan merupakan jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka menandai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi, Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang di Indonesia yang mengatur tentang anggaran kesehatan adalah UU No 36 Tahun 2009 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa besar anggaran akan dialokasikan minimal 5% dari APBN di luar gaji, dan Ayat (2) menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan 10% dari APBD di luar gaji.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik harus diberikan kepada masyarakat terdapat 2 diklafikasi yaitu pelayanan kebutuhan dan pelayanan kebutuhan pokok. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar oleh masyarakat. Dengan adanya kesehatan masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Dengan perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya yang merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kesehatan merupakan faktor utama untuk kesejahteraan masyarakat yang hendak mewujudkan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik, pemerintah juga member pelayanan kesehatan secara adil, merata dan berkualitas.

Dengan itu juga pemerintah mengalokasikan belanja untuk meningkatkan pembangunan melalui peningkatan kesehatan.

2.1.7 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Teori Rostow dan Musgrave merupakan pandangan yang timbul dari pengamatan atas pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami banyak Negara tetapi tidak didasari oleh suatu teori tertentu. Selain tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap atau beberapa tahap dapat terjadi secara simultan. Pendidikan dan kesehatan yang baik akan meningkatkan kapasitas dan kemerdekaan hidup yang dinamakan manfaat *intrinsic*. Pendidikan dan kesehatan berperan membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi yang dinamakan manfaat *instrumental*. Pendidikan dan kesehatan penduduk sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan pendidikan yang baik, pemanfaatan teknologi ataupun inovasi teknologi menjadi mungkin untuk terjadi. Seperti yang diungkapkan oleh Meier dan Rauch pendidikan atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini ditujukan sebagai referensi penulis dalam melakukan penelitian ini. Ada beberapa penelitian yang penulis gunakan, antara lain sebagai berikut.

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Meliyana Astri, Sri Indah Nikensari, Harya Kuncara (2013)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia	Dari Uji F pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, F hitung adalah sebesar 6,074 sedangkan F tabel adalah sebesar 3,171626 maka F hitung > F tabel. Artinya terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia secara serempak. Kesimpulan yang sama terjadi pada uji signifikansi dan nilai sig. Yang didapat adalah 0,004 dari hasil tersebut bahwa sig. lebih kecil dari α maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Untuk uji t, dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan berpengaruh pada IPM (t hitung 3,023 > t tabel 1,674116), namun pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan tidak berpengaruh pada IPM (t

			hitung $0,412 < t$ tabel $1,674116$).
2	Cliff Laisina, dkk (2015)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap PDRB Melalui Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara Tahun 2002-2013	Berdasarkan hasil penelitian, pengeluaran pemerintah di Sektor pendidikan memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia sedangkan di sektor kesehatan tidak memiliki pengaruh. Berdasarkan pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan ke pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia bersifat positif. Sedangkan di sektor kesehatan bersifat negatif.
3	Merang Kahang, dkk (2016)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur	Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor pengeluaran pemerintah pendidikan (X1) secara signifikan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (Y) di Kabupaten Kutai Timur. Sektor pengeluaran kesehatan pemerintah (X2) tidak signifikan mempengaruhi indeks pembangunan manusia (Y) di Kabupaten Kutai Timur. Pemerintah menunjukkan sektor pengeluaran kesehatan (X2) belum cukup menyadari dengan baik sehingga tidak cukup kuat mendorong indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Timur. Hasil penelitian dari belanja pemerintah di sektor pendidikan (X1) efek dominan dalam

			meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Timur.
--	--	--	---

2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian latar belakang dan tinjauan pustaka di atas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut.

1. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Padang.
2. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Padang.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang, dikarenakan begitu pentingnya mengetahui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai gambaran keberhasilan pembangunan manusia dibidang pendidikan dan kesehatan di Kota Padang.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari laporan atau informasi yang diterbitkan dari instansi atau lembaga penelitian yang terkait. Dalam penelitian ini penulis mengambil data dari BPS Kota Padang, adapun data yang diambil ialah:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Padang tahun 2010 – 2019
2. Target dan realisasi belanja daerah di bidang pendidikan dan kesehatan Kota Padang tahun 2010 – 2019

3.3 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel dikarenakan penelitian ini menggunakan data sekunder.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data secara dokumentasi atau study kepustakaan yang digunakan untuk memperoleh data sekunder. Dengan mengumpulkan dan

mempelajari data atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian penulis.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis regresi berganda dimana metode tersebut digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun formulanya sebagai berikut: (Supranto, 2016:237)

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Indeks Pembangunan Manusia (%)

b_0 = Konstanta

b_1, b_2 = Parameter yang akan diestimasi

X_1 = Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (Rp)

X_2 = Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (Rp)

e = Error Term (Kesalahan)

Sedangkan untuk mengetahui pengaruh atau tingkat signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen maka dapat menggunakan alat analisis eviws, dimana akan diketahui tingkat signifikan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X_1) dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (X_2) terhadap indeks pembangunan manusia (Y) di Kota Padang. Adapun uji statistik yang akan dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran

pemerintah bidang kesehatan) terhadap variabel dependen (indeks pembangunan manusia) adalah sebagai berikut.

a. Koefisien Determinasi (R^2)

R^2 digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi variabel dependen dijelaskan oleh semua variabel independen (Widarjono, 2013:69). Nilai R^2 terletak antara 0 sampai dengan 1. Jika R^2 yang diperoleh mendekati 1, maka sumbangan dari variabel independen terhadap variasi variabel dependen semakin besar. Sebaliknya jika R^2 mendekati 0, maka sumbangan dari variabel independen terhadap variasi variabel dependen semakin kecil.

b. Uji T (Uji Parsial)

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Adapun ketentuannya sebagai berikut.

- 1) $t \text{ Prob.} \leq \alpha \text{ } 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) $t \text{ Prob.} > \alpha \text{ } 0,05$ maka H_0 diterima, artinya masing-masing variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berupa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependen yaitu indeks pembangunan manusia. Adapun untuk melihat signifikan atau tidaknya bisa dilihat pada kriteria pengujian berikut ini.

1) $F_{\text{prob.}} \leq \alpha 0,05$ maka H_0 ditolak, yang berarti bahwa secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

2) $F_{\text{prob.}} \geq \alpha 0,05$ maka H_0 diterima, yang berarti bahwa secara simultan variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

d. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya penyimpangan atas asumsi klasik. Penyimpangan tersebut antara lain:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah kedua variabel dalam model regresi mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Menurut Widarjono (2013:49) ada 2 metode untuk mengetahui apakah model regresi tersebut normal atau tidak, antara lain sebagai berikut.

- a) Histogram Residual, ciri utamanya yaitu bentuk grafik distribusi normal ialah menyerupai lonceng, apabila tidak berbentuk lonceng maka model regresi tersebut mempunyai distribusi yang tidak normal.
- b) Uji Jarque-Bera, model regresi yang mempunyai distribusi normal nilai JB nya harus di atas nilai Chi Square.

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan linier antara variabel independen. Adanya hubungan antara variabel

dalam satu regresi disebut dengan multikolinieritas. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinieritas dilakukan dengan memperhatikan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) Nilai $VIF < 10$, maka tidak terkena multikolinieritas.
- b) Nilai $VIF > 10$, maka terkena multikolinieritas.

3) Uji Heteroskedastisitas

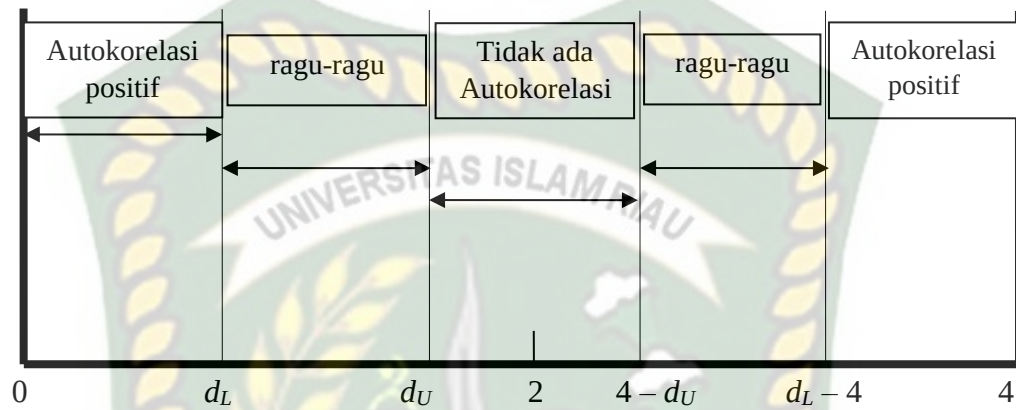
Uji heteroskedastisitas ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu metode yang digunakan untuk pengujian heteroskedastisitas ialah metode white. Metode white mengembangkan sebuah metode yang tidak memerlukan asumsi tentang adanya normalitas pada variabel gangguan (Widarjono, 2013:125). Cara mendeteksi apakah model regresi tersebut terjadi heteroskedastisitas atau tidak, bisa dilihat dari nilai *chi square* ($Obs \cdot R\text{-squared}$) dan nilai kritis *chie square* dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) Nilai *chi square* < nilai kritis, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
- b) Nilai *chi square* > nilai kritis, maka terjadi heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini dilakukan untuk menguji apakah dalam satu model regresi linier ada korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan lainnya. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari masalah

autokorelasi. Untuk pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Apabila D-W terletak antara -2 sampai +2 maka tidak ada autokorelasi.



Gambar 3.1. Statistik Durbin-Watson d

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Padang ialah Ibu Kota dan kota terbesar yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat dan juga merupakan salah satu kota tertua di Pantai Barat Pulau Sumatera. Kota Padang merupakan pintu gerbang barat Indonesia dari Samudera Hindia. Dalam rencana tata ruang wilayah nasional telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) disamping itu Kota Padang juga sebagai pusat pendidikan tinggi di Provinsi Sumatera Barat.

Secara geografis Kota Padang terletak antara $0^{\circ}44'$ dan $01^{\circ}08'$ Lintang Selatan serta antara $100^{\circ}05'$ dan $100^{\circ}34'$ Bujur Timur. Kota Padang yang membujur dari Utara ke Selatan memiliki pantai sepanjang 68.126 Km² dan terdapat deretan Bukit Barisan dengan panjang daerah bukit (termasuk sungai) 468,209 Km². Perpaduan kedua letak tersebut Kota Padang memiliki alam yang sangat indah dan juga menarik. Adapun batas-batas daerah Kota Padang dengan daerah lain ialah sebagai berikut.

1. Sebelah Utara Kota Padang berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.
2. Sebelah Selatan Kota Padang berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Sebelah Timur Kota Padang berbatasan dengan Kabupaten Solok.
4. Sebelah Barat Kota Padang berbatasan dengan Samudera Hindia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1980, luas wilayah Kota Padang secara administratif adalah 694,96 km² atau 694.960 Ha. Dari luas tersebut tersebar 11 kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 104 yang memiliki luas daerah berbeda-beda. Adapun rincian kecamatan, jumlah kelurahan dan luas daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1: Luas Wilayah Kota Padang Menurut Kecamatan dan Banyak Kelurahan di Kota Padang Tahun 2020.

No.	Kecamatan	Luas Area (Km ²)	Banyak Kelurahan
1	Bungus Teluk Kabung	100,78	6
2	Lubuk Kilangan	85,99	7
3	Lubuk Begalung	30,91	15
4	Padang Selatan	10,03	12
5	Padang Timur	8,15	10
6	Padang Barat	7,00	10
7	Padang Utara	8,08	7
8	Nanggalo	8,07	6
9	Kuranji	57,41	9
10	Pauh	146,29	9
11	Koto Tangah	232,25	13
Jumlah		694,96	104

Sumber: BPS Kota Padang, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Padang Barat memiliki luas yang paling kecil diantara kecamatan lainnya yaitu 7,00 Km² dengan jumlah kelurahan sebanyak 7 kelurahan. Sedangkan Kecamatan Koto Tangah merupakan kecamatan terluas di antara kecamatan lainnya yaitu 232,35 Km² dengan jumlah kelurahan sebanyak 13 kelurahan.

Selain daratan Pulau Sumatera, Kota Padang juga memiliki 19 pulau kecil yang menyebar di sisi pantai Kota Padang. Jika keseluruhan pulau tersebut dikelola dengan baik, akan membuat perekonomian dari sektor pariwisata Kota Padang menjadi meningkat. Berikut nama-nama pulau kecil yang tersebar di Kota Padang.

Tabel 4.2: Pulau Kecil di Kota Padang Berdasarkan Lokasi Tahun 2020

No.	Nama Pulau	Lokasi	Luas (Ha)	Keliling (m)
1	Bintagur	Kec. Bungus Teluk Kabung	56,78	3.396,80
2	Sikuai	Kec. Bungus Teluk Kabung	48,1	3.198,11
3	Sirandah	Kec. Bungus Teluk Kabung	19,18	1.741,11
4	Pasumpahan	Kec. Bungus Teluk Kabung	16,90	1.916,01
5	Sibonta	Kec. Bungus Teluk Kabung	13,18	1.423,56
6	Sironjong	Kec. Bungus Teluk Kabung	11,04	1.381,15
7	Sinyaru	Kec. Bungus Teluk Kabung	7,90	1.139,06
8	Setan	Kec. Bungus Teluk Kabung	7,81	1.331,92
9	Setan Kecil	Kec. Bungus Teluk Kabung	3,33	692,47
10	Kasik	Kec. Bungus Teluk Kabung	1,73	483,82
11	Ular	Kec. Bungus Teluk Kabung	1,38	594,98
12	Toran	Kec. Padang Selatan	33,67	2.277,23
13	Bindalang	Kec. Padang Selatan	27,06	1.996,47
14	Pisang	Kec. Padang Selatan	26,19	2.007,05
15	Pandan	Kec. Padang Selatan	24,32	1.821,77
16	Pasir Gadang	Kec. Padang Selatan	4,91	891,71
17	Pasir Ketek	Kec. Padang Selatan	3,02	846,43
18	Sao	Kec. Koto Tangah	12,46	1.380,79
19	Air	Kec. Koto Tangah	7,02	990,20

Sumber: BPS Kota Padang, 2020

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pulau-pulau kecil di Kota Padang lebih banyak terletak pada Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Pulau Bintagur yang terletak di Kecamatan Bungus Teluk Kabung merupakan pulau yang memiliki wilayah terluas diantara pulau lainnya di Kota Padang yaitu 56,78 Ha dengan keliling sebesar 3.396,80 m. Sedangkan pulau dengan luas terkecil di Kota Padang yaitu Pulau Ular yang terletak di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan luas sebesar 1,38 Ha dan keliling 594,98 m.

4.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Padang

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan disuatu daerah. IPM akan menunjukkan seberapa besar suatu daerah telah mencapai target pembangunan manusia. Angka IPM di Kota Padang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berikut grafik perkembangan IPM di Kota Padang.

Gambar 4.1: Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Padang



Sumber: BPS Kota Padang, 2020

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Padang pada tahun 2010 – 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut sudah menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan Pemerintah Kota Padang sudah menunjukkan hasil yang cukup maksimal dalam hal peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Padang.

4.3 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Kota Padang

Tingkat kompetensi seseorang sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang cerdas dan terampil yang diikuti rasa percaya diri serta sikap yang inovatif. Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Dengan pendidikan, seseorang mampu untuk menggali potensi yang ada pada dirinya untuk diaplikasikan ke dalam dunia kerja.

Untuk bisa mencapai semua hal tersebut, perlu campur tangan pemerintah dalam pengelolaan pendidikan di suatu daerah. Salah satunya seperti pengeluaran atau belanja yang dikeluarkan pemerintah dalam menangani bidang pendidikan. Pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan merupakan bagian dari belanja daerah yang diklasifikasikan menurut fungsinya dengan tujuan untuk meningkatkan output dari bidang pendidikan.

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan ialah dengan meningkatnya jumlah

pelajar yang mampu menyelesaikan masa studi sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu untuk mengerti dan dapat menerapkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi. Berikut realisasi pengeluaran pemerintah bidang pendidikan di Kota Padang.

Tabel 4.3: Realisasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan di Kota Padang Tahun 2010 - 2019

Tahun	Pengeluaran Pemerintah Bidang pendidikan (Rp)
2010	51.241.784.000,00
2011	68.168.030.000,00
2012	60.710.480.000,00
2013	51.898.760.000,00
2014	88.578.890.000,00
2015	89.857.356.500,00
2016	86.073.007.396,00
2017	185.521.711.330,00
2018	722.956.168.538,00
2019	746.715.380.610,00

Sumber: BPS Kota Padang, 2020

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tahun 2010 – 2019 mengalami naik turun. Jumlah pengeluaran pemerintah terendah dibidang pendidikan yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp. 51.241.784.000,00. Sedangkan jumlah pengeluaran pemerintah tertinggi dibidang pendidikan yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp. 746.715.380.610,00.

4.4 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Kota Padang

Kesehatan merupakan kebutuhan yang penting sekaligus investasi bagi pembangunan sumber daya manusia agar mereka dapat hidup dengan sehat. Pembangunan pelayanan dan kualitas kesehatan harus ditingkatkan pada

perbaikan gizi, menurunkan angka kematian bayi dan ibu melahirkan dan juga upaya untuk jangka waktu usia. Dengan demikian, untuk mencapai peningkatan pada bidang kesehatan tersebut diperlukan campur tangan pemerintah berupa biaya-biaya untuk menunjang kegiatan peningkatan tersebut.

Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan hal yang penting dalam kehidupan, dengan kondisi tubuh yang sehat maka seseorang bisa melakukan segala aktifitasnya. Peneluaran atau belanja pemerintah pada bidang kesehatan digunakan untuk memenuhi fasilitas kesehatan yang dibutuhkan masyarakat seperti rumah sakit, puskesmas, dan lainnya, serta pemenuhan SDM seperti dokter, perawat dan lainnya yang diharapkan mampu untuk melayani masyarakat dalam hal kesehatan. Besarnya realisasi pengeluaran pemerintah untuk bidang kesehatan diukur dengan anggaran APBD menurut sektor kesehatan. Berikut realisasi pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan di Kota Padang.

Tabel 4.4: Realisasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan di Kota Padang Tahun 2010 – 2019

Tahun	Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (Rp)
2010	6.601.247.000,00
2011	31.270.090.000,00
2012	29.359.190.000,00
2013	22.466.460.000,00
2014	84.574.580.000,00
2015	83.185.985.580,00
2016	121.694.935.281,00
2017	100.141.285.358,00
2018	173.614.121.823,00
2019	192.774.334.360,00

Sumber: BPS Kota Padang, 2020

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan tahun 2010 – 2019 mengalami naik turun. Jumlah pengeluaran pemerintah terendah dibidang kesehatan yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp. 6.601.247.000,00. Sedangkan jumlah pengeluaran pemerintah tertinggi dibidang kesehatan yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp. 192.774.334.360,00.

4.5 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data dengan menggunakan Program Eviews 9 diketahui pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X_1) dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (X_2) terhadap Indeks pembangunan manusia (Y) di Kota Padang dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5: Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Date: 04/02/21 Time: 06:41				
Sample: 2010 2019				
Included observations: 10				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	37.02999	4.813405	7.693095	0.0001
LX1	0.753662	0.281429	2.677980	0.0316
LX2	0.962203	0.267602	3.595647	0.0088
R-squared	0.921666	Mean dependent var	80.10900	
Adjusted R-squared	0.899285	S.D. dependent var	1.751764	
S.E. of regression	0.555933	Akaike info criterion	1.906989	
Sum squared resid	2.163434	Schwarz criterion	1.997764	
Log likelihood	-6.534943	Hannan-Quinn criter.	1.807408	
F-statistic	41.18051	Durbin-Watson stat	2.014470	
Prob(F-statistic)	0.000135			

Sumber: Hasil Olahan Eviews 9

Berdasarkan tabel hasil pengolahan di atas, maka diketahui fungsi persamaan sebagai berikut.

$$Y = 37.02999 + 0.753662 X_1 + 0.962203 X_2$$

Dari fungsi persamaan di atas, maka dapat diketahui pengaruh dari pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Padang. Berikut akan dijabarkan tentang pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia secara rinci.

4.5.1 Koefisien Regresi

Berdasarkan fungsi persamaan di atas, maka diketahui nilai koefisien dari setiap variabel. Berikut akan dijelaskan maksud dari nilai koefisien setiap variabel tersebut.

1. Konstanta b_0 sebesar 37.02999 artinya besarnya indeks pembangunan manusia jika pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan sama dengan 0 adalah 37.02999 %.
2. Nilai koefisien b_1 sebesar 0.753662. Hal tersebut berarti variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (Y) di Kota Padang. Pengaruh positif tersebut artinya jika terjadi penambahan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan sebesar Rp. 1 Juta maka akan menaikkan indeks pembangunan manusia sebesar 0.753662 %.
3. Nilai koefisien b_2 sebesar 0.962203. Hal tersebut berarti variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (X_2) berpengaruh positif dan

signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (Y) di Kota Padang. Pengaruh positif tersebut artinya jika terjadi penambahan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan sebesar Rp. 1 Juta maka akan menaikkan indeks pembangunan manusia sebesar 0.962203 %.

4.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas (pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan) mampu menjelaskan variabel terikat (indeks pembangunan manusia). Diketahui nilai R^2 yaitu sebesar 0.921666. Hal tersebut berarti bahwa sebesar 92,12 % variabel bebas (pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan) sudah mewakili untuk menjelaskan variabel terikat (indeks pembangunan manusia). Sedangkan sisanya sebesar 7,88 % dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.5.3 Uji T (Uji Parsial)

Uji T merupakan pengujian terhadap koefisien dari variabel bebas secara parsial. Uji T ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individu (parsial) mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat, dengan ketentuan apabila $t \text{ prob. variabel bebas} < \alpha 0,05$ maka H_0 ditolak dan apabila $t \text{ prob. variabel bebas} > \alpha 0,05$ maka H_0 diterima. Berikut penjelasan mengenai Uji T.

1. Pengujian Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X_1) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y)

Berdasarkan hasil estimasi, maka diketahui nilai t prob. pengeluaran pemerintah Bidang Pendidikan sebesar $0.0316 < \alpha 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Hal tersebut berarti secara parsial pengeluaran pemerintah bidang pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Padang.

2. Pengujian Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (X_2) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y)

Berdasarkan hasil estimasi, maka diketahui nilai t prob. pengeluaran pemerintah Bidang Pendidikan sebesar $0.0088 < \alpha 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Hal tersebut berarti secara parsial pengeluaran pemerintah bidang kesehatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Padang.

4.5.4 Uji F

Uji F merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan atau tidak terhadap produksi tahu di Kota Pekanbaru. Ketentuan dalam pengujiannya ialah jika F prob. $< \alpha 0,05$ maka H_0 ditolak dan jika F prob. $> \alpha 0,05$ maka H_0 diterima.

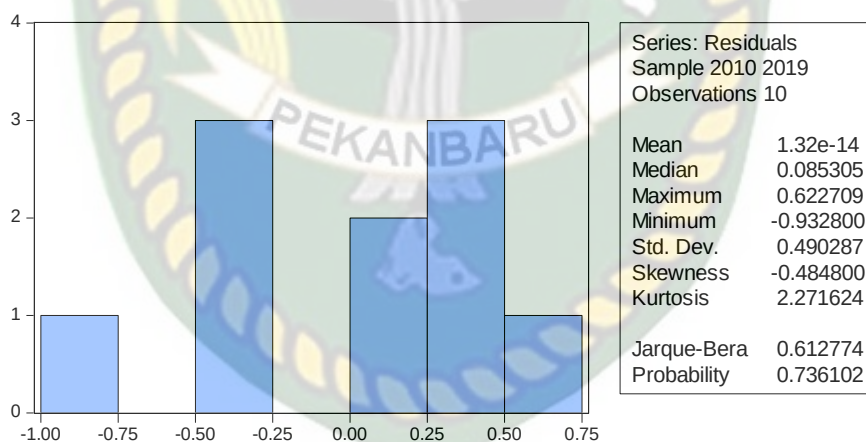
Dari hasil estimasi, diketahui bahwa nilai F prob. sebesar $0.000135 < \alpha 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Hal tersebut berarti bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Padang.

4.5.5 Uji Asumsi Klasik

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya penyimpangan atas asumsi klasik. Berikut akan dijelaskan hasil analisa pada uji asumsi klasik.

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah variabel bebas dan variabel terikat dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah model regresi tersebut normal atau tidak bisa dilihat dari bentuk histogram residual yang pada umumnya berbentuk lonceng jika mempunyai distribusi normal dan juga melakukan Uji Jarque-Bera.



Sumber: Hasil Olahan Eviews 9

Dari hasil estimasi, terlihat bahwa grafik histogram residual model regresi tersebut tidak berbentuk lonceng maka kedua variabel tersebut mempunyai distribusi yang tidak normal. Sedangkan jika dilihat menggunakan uji Jarque-Bera diketahui nilai JB ialah 0,612774 dan nilai

Chi Square ialah 7,815. Nilai JB lebih kecil dari nilai *Chi Square* yang berarti model regresi tersebut mempunyai distribusi yang tidak normal.

2. Uji Multikolinieritas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan linier antara variabel independen. Adanya hubungan antara variabel dalam satu regresi disebut dengan multikolinieritas. Pengujian ini dilakukan dengan memperhatikan nilai VIF dengan ketentuan jika nilai $VIF < 10$ maka tidak terkena multikolinieritas, dan jika nilai $VIF > 10$ maka terkena multikolinieritas.

Variance Inflation Factors			
Date: 04/02/21 Time: 06:44			
Sample: 2010 2019			
Included observations: 10			
	Coefficient	Uncentered	Centered
Variable	Variance	VIF	VIF
C	23.16887	749.6514	NA
LX1	0.079202	1672.752	2.370545
LX2	0.071611	1424.449	2.370545

Sumber: Hasil Olahan Eviews 9

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka diketahui nilai VIF dari variabel independen yaitu nilai VIF X_1 ialah 2,370545 dan nilai VIF X_2 ialah 2,370545. Dapat dilihat bahwa nilai VIF dari kedua variabel independen tersebut lebih kecil dari 10 yang artinya kedua variabel tersebut tidak terkena multikolinieritas. Hal tersebut berarti antara pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan tidak memiliki hubungan linear di dalam model regresi tersebut.

3. Uji Hseteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara mendeteksi apakah model regresi tersebut terjadi heteroskedastisitas atau tidak, bisa dilihat dari nilai *chi square* (Obs *R-squared) dan nilai kritis *chi square* dengan ketentuan jika nilai *chi square* lebih kecil dari nilai kritis maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan jika nilai *chi square* lebih besar dari nilai kritis maka terjadi heteroskedastisitas.

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	0.347251	Prob. F(2,7)	0.7181
Obs*R-squared	0.902595	Prob. Chi-Square(2)	0.6368
Scaled explained SS	0.281202	Prob. Chi-Square(2)	0.8688

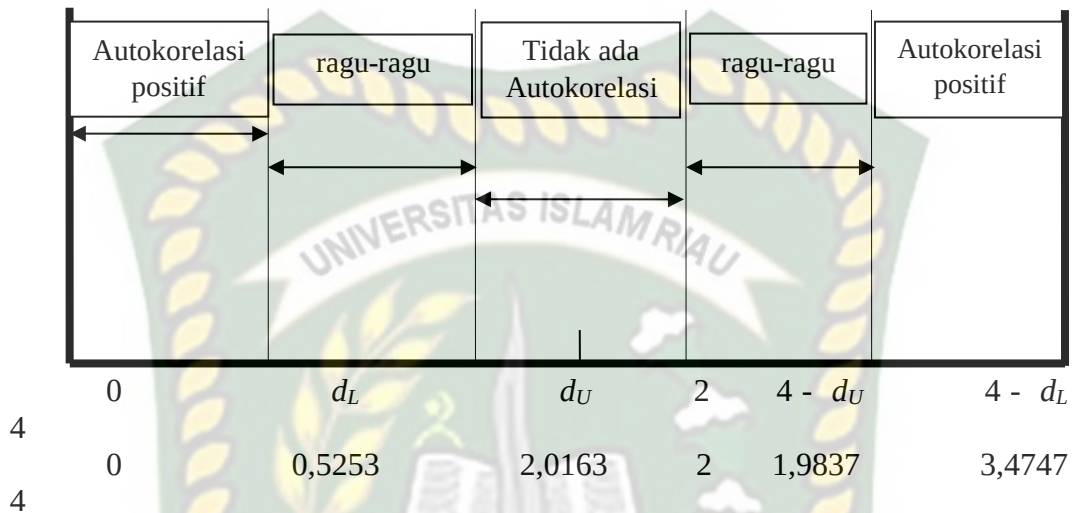
Sumber: Hasil Olahan Eviews 9

Berdasarkan hasil dari pengolahan data, maka diketahui bahwa nilai *Chi Square* (Obs *R-squared) ialah sebesar 0,6368. Sedangkan nilai kritis *Chi Square* ialah 7,815. Dapat dilihat bahwa nilai *Chi Square* lebih kecil dari nilai kritis yang artinya model regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam satu model regresi linier ada kolerasi antara satu variabel gangguan dengan variabel lainnya. Jika terjadi kolerasi maka dinamakan ada masalah autokolerasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokolerasi. Cara mendeteksi ada atau tidaknya autokolerasi ini dapat

dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson. Apabila nilai D-W terletak antara -2 sampai +2 maka tidak ada autokorelasi



Dari hasil estimasi, diketahui bahwa nilai Durbin-Watson ialah 2.014470. jika dilihat pada kurva di atas, maka nilai tersebut terletak diantara d_L dan d_U pada kriteria ragu-ragu. Hal tersebut berarti dalam model regresi linear tersebut dikategorikan ragu-ragu antara bebas dari autokorelasi atau terkena masalah autokorelasi.

4.6 Pembahasan

1. Pengeluaran Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
2. Pengeluaran Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Dari hasil penelitian di atas, maka diketahui bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X_1) dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (X_2) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (Y) di Kota Padang. Karena hal ini menunjukkan pengeluaran bidang pendidikan pemerintah dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan

yang baik. Pengeluaran bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di padang, hal ini menunjukkan di bidang kesehatan khususnya dari alokasi belanja pemerintah pusat sudah tepat sasaran dan dalam pelaksanaan perlu terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Sesuai teori Sukirno (2004) pendidikan merupakan satu investasi yang sangat berguna untuk pembangunan ekonomi. Dengan demikian pendidikan dapat dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati oleh semua orang dikemudian hari. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang dampaknya langsung terhadap pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan teori yang disampaikan Sukirno maka hasil penelitian penulis telah sama dengan teori tersebut yaitu pendidikan berpengaruh terhadap pembangunan manusia. Pada penelitian penulis, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya Todaro (2011,85) menyebutkan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap manusia. Tanpa adanya kesehatan, masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas untuk negara. Kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, kesehatan sangat penting dalam pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi. Berdasarkan teori yang disampaikan Todaro maka hasil penelitian penulis telah sama dengan teori tersebut yaitu kesehatan berpengaruh terhadap pembangunan

manusia. Pada penelitian penulis, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Cliff Laisina, dkk tahun 2015 dengan judul Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap PDRB Melalui Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara Tahun 2002-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di Sektor pendidikan memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia sedangkan di sektor kesehatan tidak memiliki pengaruh. Berdasarkan pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan ke pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia bersifat positif, sedangkan di sektor kesehatan bersifat negatif. Berdasarkan penelitian tersebut, maka hasil penulis hampir sama dengan hasil penelitian Cliff Laisina, dkk. Pada penelitian penulis, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan.

Selanjutnya penelitian yang telah dilakukan oleh Merang Kahang, dkk tahun 2016 dengan judul Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur. Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor pengeluaran pemerintah pendidikan (X1) secara signifikan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (Y) di Kabupaten Kutai Timur. Sektor pengeluaran kesehatan pemerintah (X2) tidak signifikan mempengaruhi indeks pembangunan manusia (Y) di Kabupaten Kutai Timur. Pemerintah menunjukkan sektor pengeluaran kesehatan (X2) belum cukup menyadari dengan baik sehingga tidak cukup kuat mendongkrak indeks

pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Timur. Hasil penelitian dari belanja pemerintah di sektor pendidikan (X1) efek dominan dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan penelitian tersebut, maka hasil penulis hampir sama dengan hasil penelitian Merang Kahang, dkk. Pada penelitian penulis, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil olahan data menggunakan alat analisis Eviews diketahui bahwa nilai R^2 yaitu sebesar 0.921666. Hal tersebut berarti bahwa sebesar 92,12 % variabel bebas (pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan) sudah mewakili untuk menjelaskan variabel terikat (indeks pembangunan manusia). Sedangkan sisanya sebesar 7,88 % dijelaskan oleh variabel lain di luar model.
2. Berdasarkan nilai koefisien dan Uji T diketahui bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X_1) dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (Y) di Kota Padang.

5.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis mencoba untuk memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.

Adapun saran tersebut ialah sebagai berikut.

1. Untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama, sebaiknya melakukan pengembangan variabel-variabel agar hasil yang didapat lebih baik lagi.

2. Untuk masyarakat diharapkan mampu untuk memanfaatkan fasilitas pendidikan maupun fasilitas kesehatan yang telah disediakan pemerintah setempat untuk menunjang angka indeks pembangunan manusia bisa lebih meningkat.
3. Untuk pemerintah diharapkan agar membuat strategi pembangunan terutama masyarakat miskin agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dengan penyempurnaan sistem sosial dan melakukan pemberdayaan masyarakat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Padang tahun 2010 – 2019*
- Badan Pusat Statistik. *Target dan realisasi belanja daerah di bidang pendidikan dan kesehatan Kota Padang tahun 2010 – 2019*
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika daerah. Edisi Pertama*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Cliff Laisina, dkk. 2015. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap PDRB Melalui Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara Tahun 2002-2013*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 15 No. 04 Tahun 2015
- Elfindri. Nasri, Bachtiar. 2004. *Ekonomi ketenagakerjaan*. Andalas University Press: Padang
- Merang Kahang, dkk. 2016. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur*. FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Volume 18, (2), 2016 ISSN print: 1411-1713, ISSN online: 2528-150X
- Meylina, Astri dkk. (2013). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesi*. Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Vol.1. No. 1 Tahun 2012. ISSN:2302-2663.
- Mirza, Danni S. 2012. *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. Economics Development Analysis jurnal
- Mudrajad, Kuncoro. 2013. *Mudah Memahami dan menganalisis Indikator ekonomi*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Jorgenson Dale, dkk. 1987. *Hubungan antara pengeluaran di Sektor Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. (Jurnal Ilmu Ekonomi). Universitas Andalas. Sumatera Barat.

Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan rakyat*. Bandung Refika Aditama.

Suparmoko, 1998. "*Pengantar Ekonomi Makro*". BPFE-UGM Yogyakarta.

Supranto. 2016. *Statistik Teori & Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.

Suryana, 2000. *Ekonomi Pemangunan: problematika serta pendekatan*, Jakarta: Salemba Empat

Todaro, Michael.P. 1994. *Ekonomi untuk Negara berkembang*. Edisi ketiga, Jakarta : BUMI AKSARA

Wahid, Billa. A. 2012. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi*. Makassar.

Widarjono, Agus. 2013. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Edisi Keempat*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.